

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 di Tanah Laut Antara Risiko dan Optimisme



Sumber gambar:

<https://tirto.id/profil-kabupaten-tanah-laut-letak-geografis-hingga-sejarah-gPPr>

APBD adalah suatu bentuk konkrit rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemda yang dinyatakan dalam bentuk uang, untuk mencapai tujuan yang direncanakan satu tahun anggaran (R.A Chalid). Definisi tersebut cukup jelas bahwa APBD merupakan (1) rencana kerja keuangan daerah; (2) dilakukan secara komprehensif menyangkut penerimaan dan pengeluaran; (3) dinyatakan dalam bentuk uang; (4) mencapai tujuan dalam satu tahun anggaran.

Oleh karena itu, APBD harus disusun dengan cermat, tepat dan akurat sehingga pencapaian tujuan benar-benar efektif, efisien dan menghadirkan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Ada hal yang menarik untuk dianalisa dari penetapan APBD Tanah Laut tahun 2024 yang penulis anggap sungguh spektakuler. Saya anggap spektakuler karena inilah APBD Tanah Laut terbesar yang ditetapkan sepanjang sejarah perjalanan Bumi Tuntung Pandang yakni sebesar Rp2.781.439.035.762.

Anggaran sebesar itu, dapat membangun optimisme tahun 2024. Seperti kemampuan membangun lebih besar, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan kemampuan pelayanan pemerintah lebih baik. Muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kendati demikian, ada hal yang perlu dapat perhatian sungguh-sungguh dari seluruh pejabat Pemkab Tanah Laut. Mengapa demikian?

Ada beberapa hal yang harus jadi perhatian. Pertama, dari aspek Pendapatan. Target pendapatan Daerah sebesar Rp2,106 triliun rupiah bukan pekerjaan mudah untuk mencapainya.

Lihat tren pendapatan daerah di kurun empat tahun terakhir. Tahun 2019 sebesar Rp1,497 triliun. Tahun 2020 sebesar Rp1,514 triliun. Tahun 2021 sebesar Rp1,4 trilyun. Tahun 2022 sebesar Rp1,750 triliun.

Sedangkan dalam perubahan APBD 2023 sebesar Rp1,739 triliun. Artinya, ada tantangan besar untuk bisa mencapai target Rp2,106 triliun.

Mengejar peningkatan pendapatan sebesar Rp300 miliaran bukan pekerjaan mudah. Apalagi sumber pendapatan yang diharapkan adalah dari pendapatom transfer, mengingat kondisi APBN tahun 2024 tidak ada sesuatu yang signifikan untuk bila melakukan tranfer pendapatom secara besar-besaran.

Coba kita lihat tren Dana Transfer ke daerah dari tahun 2021 sebagai berikut:

Tahun 2021 sebesar Rp 795, 48 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 769,41 trilyun, tahun 2023 sebesar Rp 814,72 trilyun zdan APBN tahun 2024 direncanakan sebesar Rp857,59 triliun.

Belum lagi jika kita lihat alokasi dana transfer tersebut, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana otonomi khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa, dan Insentif Fiskal (atas kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan).

Dari 7 Item dana transfer tersebut yang boleh dikata alokasinya ada kepastian, adalah alokasi untuk DAU dan Dana Desa.

Sementara alokasi DBH akan sangat tergantung dari harga komoditas pertambangan dan kehutanan, mengingat kedua komoditas itulah yang memberikan kontribusi terbesar dari transfer DBH.

Tahun 2022/2023 DBH Tanah Laut cukup besar karena harga batubara dunia sangat tinggi mencapai US\$400/ton, sementara sejak januari 2023 terus mengalami penurunan. Merujuk pada Refinitiv, harga batubara ICE Newcastle kontrak november ditutup posisi US\$143/ton.

Bahkan data terbaru yang saya kutip dari Kontan.co.id, prediksi tahun depan harga batubara berkisar US\$ 125/ton.

Data terbaru yang kami kutip Hari Jumat (22/12) yang lalu, kontrak Januari di ICE Futures turun 0,28 % di harga US\$ 141,25/ton. Artinya Pemkab Tala harus benar-benar ekstra waspada dalam mengendalikan pedapatan dari dana transfer DBH, mengingat DBH Tanah Laut bersandar pada hasil pertambangan Batubara.

Memang masih ada dana transfer lainnya, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK), Namun DAK tahun 2024 sudah teralokasi sekitar Rp 232 miliar. Itu pun sebagian besar untuk kegiatan non fisik, sementara kegiatan fisik hanya sekitar Rp57 miliar.

Untuk Dana insentif fiskal akan sangat tergantung dari kinerja Pemerintah Daerah. Baik kinerja tahun lalu maupun kinerja berjalan.

Dana insentif Daerah juga tidak bisa diandalkan, karena alokasinya pun tidak besar. Kesimpulan sementara saya, memasang target Rp1.892 triliun dari dana transfer, terdapat risiko yang cukup besar untuk mencapainya.

Kemudian dari sisi pendapatan asli daerah, belum ada peningkatan pendapatan yang signifikan. karena masih berkuat pada sumber-sumber pendapatan yang ada.

Bahkan di tahun 2024 ada beberapa penerimaan daerah yang dihapuskan seperti uji kendaraan bermotor.

Memang jika ingin mendapatkan kenaikan PAD yang signifikan dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat adalah melalui Ivestasi daerah. Apakah investasi permanen maupun non permanen. Juga maksimalisasi kinerja BUMD, dan maksimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Untuk peningkatan pajak dan retribusi, di samping intensifikasi, ekstensifikasi, penyesuaian tarif bisa dilakukan, meski perlu sebuah kebijakan strategis.

Namun untuk tahun anggaran 2024, tampaknya langkah-langkah itu belum ditempuh secara maksimal. Sehingga sektor PAD belum akan ada kenaikan yang signifikan untuk menutup jika dana transfer tidak tercapai 100 persen.

Kedua Aspek Belanja. Mencermati Belanja APBD tahun 2024, betul betul spektakuler dengan anggaran sebesar Rp2.781.439.035.762 rupiah. Jika dibandingkan antara belanja dengan pendapatan maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp674.867.959.624 rupiah.

Memang defisit tersebut kemudian ditutup dari silpa anggaran tahun sebelumnya. Artinya Silpa tahun 2023 habis untuk menutup defisit.

Pertanyaannya, bagaimana jika silpa itu tidak mencapai jumlah tersebut?

Yang Ketiga, Belanja meningkat drastis. Dari RKPD tahun 2024 sebesar Rp 2,08 Trilyun, KUA/PPAS sebesar Rp2,424 triliun, dan APBD mencapai Rp 2,781 trilyun. Berarti ada peningkatan sekitar Rp700 milyar atau sekitar 33% di luar RKPD sebagai hasil proses perencanaan Top Down maupun bottom up planing.

Oke lah ada tambahan pikir DPRD, program yang turun dari pemerintah yang lebih atas, tetapi tambahan kegiatan sebesar 33 persen menunjukkan betapa buruknya perencanaan.

Karena itu, pengendalian belanja benar-benar harus menjadi ekstra perhatian. Artinya perlu ada komitmen yang kuat dari top manajemen Pemkab untuk melakukan pengendalian belanja dengan terus mencermati perkembangan pendapatan.

Ketika pendapatan tidak menunjukkan tren positif, sewajarnya top manajemen Pemkab berani melakukan rasionalisasi kegiatan, dengan menunda kegiatan-kegiatan yang kurang bahkan tidak urgen.

Jika belanja ini tidak dimanajementi dengan baik dan tanpa memperhatikan trend pendapatan maka dapat dipastikan akan terjadi gagal bayar, dan itu adalah sebuah bencana manajemen pemerintahan.

Hal ini tidak boleh terjadi, mengingat selama ini Tanah Laut selalu terjaga kesinambungan pembangunan dengan APBD yang sehat.

Jika gagal bayar terjadi, maka beban APBD tahun 2025 menjadi sangat berat. Padahal KONI Tanah Laut sudah memproklamirkan sebagai tuan rumah PORPROV ke 12 tahun 2025, yang sudah barang tentu memerlukan ketersediaan anggaran yang cukup.

Di satu sisi Bupati terpilih tentu ingin segera memenuhi janji-janji politiknya, dan itu juga perlu anggaran yang cukup.

Sebab itulah APBD Tanah Laut tahun 2024 perlu sebuah manajerial yang kuat. Sehingga betul-betul terkendali dan pembangunan berkesinambungan. Optimisme untuk bisa membangun lebih besar adalah sangat baik.

Ambisi untuk membangun kesejahteraan rakyat dengan alokasi dana sebesar besarnya juga baik, tetapi juga harus diingat, perlunya dilakukan mitigasi resiko. Jangan sampai nafsu besar tenaga kurang, “Besar Pasak Dari Pada Tiang”.

Antara optimisme dengan mitigasi resiko harus berjalan seimbang. Kapan saat menginjak pedal gas, dan kapan harus menginjak rem harus pada saat yang tepat.

Semoga tulisan ini bisa menjadi bagian dari membangun Tanah Laut secara berkesinambungan.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/opini/1973691575/menyoroti-apbd-tanah-laut-2024-antara-risiko-dan-optimisme>, 3 Januari 2024.
2. <https://poroskalimantan.com/apbd-2024-di-tala-antara-risiko-dan-optimisme/>, 2 Januari 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
- Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Struktur APBD

